**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD RSUD PURUK CAHU MURUNG RAYA
DENGAN
APOTIK BARITO**

Nomor : 445/ /UPTD RSUD

Nomor :

**TENTANG
PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini **senin** tanggal **sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Dua** (10-01-2022) bertempat di Murung Raya, telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **dr. DEBI RUMONDANG SIREGAR, Sp.THT-K.L** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 821/04/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administratif Dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.01, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **JIMI HARIYANI, S. Farm.Apt** : selaku Direktur/Pimpinan Apotik Barito yang beralamat di jalan Merdeka RT.01 RW. 03 Puruk Cahu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Apotik Barito, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung untuk memenuhi kebutuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) di UPTD RSUD Puruk Cahu Murung Raya melalui Anggaran BLUD Tahun 2022 yang selanjutnya disebut "Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Alat Kesehatan (Alkes)"

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Besar Farmasi dan Alat Kesehatan yang dibuktikan dengan:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 530.3/080/080/159/2009 dikeluarkan di Puruk Cahu tanggal 11 September 2009
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 150.908.0000165 Dikeluarkan di Puruk Cahu tanggal 11 September 2009
 3. NPWP 14.578.341.1-7 14.000
4. Harga Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) yang ditawarkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah harga yang telah ditentukan dengan memperhitungkan pajak (HNA+PPN) sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku dan setiap perubahan harga yang terjadi harus lebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** menawarkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan **Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes)** dalam Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) sesuai dengan surat pesanan kebutuhan yang disampaikan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan UPTD RSUD Puruk Cahu Murung Raya.
6. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima tawaran kerjasama dari **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan kebutuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) sesuai kebutuhan UPTD RSUD Puruk Cahu Murung Raya dengan ketentuan harga yang sudah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama di bidang pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) dimana **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan stok serta memenuhi kebutuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) pada UPTD RSUD Puruk Cahu Murung Raya sesuai dengan pesanan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yakni dari tanggal 10 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal Desember 2022 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan serta jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA Hak untuk :

1. Melaksanakan Survei ke gudang atau tempat penyimpanan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) **PIHAK KEDUA**;
2. Memeriksa hasil pekerjaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dari **PIHAK KEDUA**;
3. Mengembalikan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** jika menemukan kerusakan;
4. Menolak Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** jika tidak sesuai dengan Surat Pesanan

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

1. Membuat dan menyampaikan surat pesanan kebutuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengadaan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian ini.
2. Menerima dan memeriksa hasil pekerjaan pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan surat pesanan, faktur dan tanda bukti pengiriman barang dimaksud.
3. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai hasil pekerjaan dengan pertanggungjawaban berupa Faktur, kwitansi pembayaran dengan materai secukupnya yang dilengkapi dengan faktur, Berita Acara

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Pemeriksaan Barang dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA Hak untuk :

1. Mendapat atau menerima hasil penjualan atas barang dan jasa Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai tanggal jatuh tempo berdasarkan transaksi dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penagihan sesuai tanggal jatuh tempo dengan menerima pembayaran sesuai dengan yang tertera di faktur tagihan dengan tepat waktu oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Menyediakan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) berdasarkan pesanan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah disepakati.
2. Mengirimkan dan atau menyerahkan barang Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) yang telah dipesan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan lengkap, baik dan sesuai dengan jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemesanan. Untuk pengiriman dan penyerahan barang dengan jumlah besar harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
3. Menjamin ketersediaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Alat Kesehatan (Alkes) sesuai pesanan dari **PIHAK PERTAMA** dan apabila terjadi kekosongan maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kepala Instalasi Farmasi selambat-lambatnya 1(satu) minggu sejak pesanan disampaikan.
4. Proses pengiriman barang Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Alat Kesehatan (Alkes) harus terjamin keamanan dan kualitas produknya, pengiriman sesuai dengan suhu barang, terutama untuk obat-obatan coldchain (suhu 2⁰-8⁰ C)
5. **PIHAK KEDUA** harus menjamin keaslian obat yang diberikan.

PASAL 5 SISTEM KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan pesanan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) sesuai kebutuhan dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Surat Pesanan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** berlaku selama 1 (satu) minggu sejak pesanan disampaikan dan pesanan tersebut telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat pesanan disampaikan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

3. Berdasarkan surat pesanan dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengiriman barang Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) sesuai jenis dan jumlah yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan **butir 2** diatas.
4. Untuk menjamin ketersediaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Alat Kesehatan (Alkes), **PIHAK PERTAMA** dapat mengalihkan pesanan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) kepada pihak lain apabila terjadi kekosongan barang Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) yang dipesan setelah ada pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan pada **Pasal 4 butir 3**.
5. Barang Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) yang dikirimkan atau diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan diserahterimakan kepada **PIHAK PERTAMA** dimana apabila terdapat barang Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) dengan masa kadaluarsa (ED) pendek < 2 tahun maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengganti atau mengembalikan barang tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat dari kesalahan cara pengiriman atau karena kelalaian dari **PIHAK KEDUA** maka segala biaya penggantian yang timbul akan menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.
7. Apabila terdapat bahan yang masa kadaluarsa (ED) < 2 tahun maka **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan surat yang menyatakan bahwa barang tersebut bisa di kembalikan/retur.

PASAL 6 SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya (Faktur Asli), dan jumlah barang yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan pertanggung jawaban berupa kwitansi pembayaran dengan materai secukupnya yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. Berkas penagihan dari **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.
3. Pada akhir tahun anggaran, pembayaran dilaksanakan paling lambat tanggal Desember 2022.
4. Apabila anggaran tidak cukup di tahun 2022 maka dilakukan pembayaran di tahun berikutnya, dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Pembayaran dilaksanakan melalui Rekening Bank **PIHAK KEDUA** yaitu pada Bank BNI Cab. Muara Teweh. dengan nomor rekening 0158830124 an Jimi Hariyani, S. Farm.Apt

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
PEMBATALAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Surat Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya kecuali oleh alasan tertentu sebagaimana butir – butir pada Pasal 7 berikut.
2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan *force majeure* maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Selain oleh alasan *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan perjanjian apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi pesanan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya atau dengan sengaja tidak memenuhi pesanan dari **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Apabila dipandang perlu oleh kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diubah baik yang menyangkut materi maupun syarat-syaratnya dan harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sesuatu keadaan yang memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini.
2. Hal-hal yang dapat digolongkan dalam *Force Majeure* (keadaan memaksa) adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : bencana alam, tindakan sabotase, peperangan, huru-hara, blokade, atau kebijakan pemerintah dibidang moneter.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diusahakan oleh suatu Badan Arbitrage yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu masing-masing seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk dan disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
3. Bila juga tidak diperoleh penyelesaian melalui Badan Arbitrage, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kedudukan tetap dan sah pada Kantor Pengadilan Negeri di Muara Teweh.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

**PIHAK PERTAMA,
Direktur UPTD RSUD Puruk Cahu**

**PIHAK KEDUA,
Direktur Apotik Barito**

**dr. Debi Rumondang Siregar, Sp.THT-K.L
NIP. 19800904 200604 2 022**

Jimi Hariyani, S.Farm.Apt

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua